

57 / LP / FS / 07 / 2014

*Laporan Penelitian*

**KONDISI EKONOMI  
MASYARAKAT MUSTAHIQ  
(Studi Fenomenologis Terhadap Masyarakat  
Kampung Nelayan Belawan Kota Medan)**

Oleh:

Ali Akbar S. Ag. M. Ag  
NIP. 19710412 2007 10 1003



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

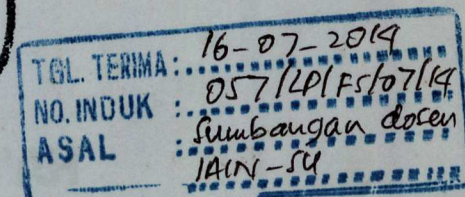


Laporan Penelitian

**KONDISI EKONOMI  
MASYARAKAT MUSTAHIQ**  
(Studi Fenomenologis Terhadap Masyarakat  
Kampung Nelayan Belawan Kota Medan)

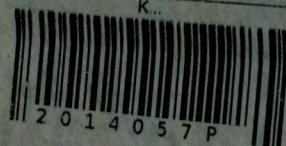
Oleh:

Ali Akbar S. Ag, M. Ag  
NIP. 19710412 2007 10 1003



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

P  
2 x 6.3  
AKB  
h  
x.1





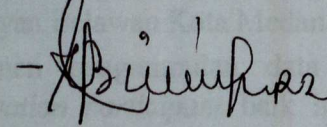
Laporan Penelitian

**KONDISI EKONOMI  
MASYARAKAT MUSTAHIQ  
(Studi Fenomenologis Terhadap Masyarakat  
Kampung Nelayan Belawan Kota Medan)**

Oleh:

Ali Akbar S. Ag, M. Ag  
NIP. 19710412 2007 10 1003

Konsultan Penelitian



Dra. Achiriah, M.Hum  
NIP. 19631010 1994 03 2001

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

PERPUSTAKAAN  
IAIN-SU  
MEDAN

NO. INDUK :  
ASAL :  
TANGGAL :  
KETERANGAN :



## ABSTRAKSI

“KONDISI EKONOMI MASYARAKAT MUSTAHIQ  
(Studi Fenomenologis Terhadap Masyarakat Kampung  
Nelayan Belawan Kota Medan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat penerima zakat (mustahiq) yaitu masyarakat kampung nelayan Belawan Kota Medan.

Penelitian ini dilakukan di kampung nelayan Belawan Kota Medan. Informan penelitiannya adalah masyarakat penerima zakat (mustahiq) yaitu masyarakat kampung nelayan Belawan Kota Medan.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *observation participant* baik melalui wawancara maupun keterlibatan langsung.

Data penelitian ini dianalisis dengan melakukan Analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan didasarkan pada pemikiran logis data untuk diteliti setelah diberi penjelasan dalam bentuk uraian. Data disajikan sekaligus menganalisisnya (*deskriptif analysis*), dengan kata lain, agar tidak kehilangan relevansinya, penyajian data tidak dipisahkan dari analisisnya yang dilakukan secara bersamaan.

Dari pembahasan hasil penelitian ditemukan bahwa benar masyarakat etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan termasuk dalam kriteria kelompok salah satu ashnaf penerima zakat yaitu miskin.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur penulis sembahkan kepada Allah SWT, karena dengan kemampuan, kekuatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini yang berjudul "KONDISI EKONOMI MASYARAKAT MUSTAHIQ (Studi Fenomenologis Terhadap Masyarakat Kampung Nelayan Belawan Kota Medan)", dengan baik dan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen fakultas syariah IAIN Sumatera Utara.

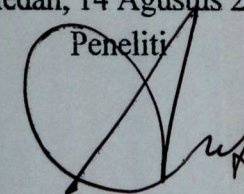
Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan dukungan berbagai pihak baik secara individu maupun institusi, secara moril maupun materil. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut melancarkan penyelesaian tugas ini.

Akhirnya, meskipun penelitian ini telah selesai disusun, tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, kritik dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Kepada Allah SWT jualah, penulis lantunkan do'a dan harapan mudah-mudahan penelitian ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga akan menambah timbangan amal kebaikan di kemudian hari.

Medan, 14 Agustus 2013

Peneliti



Ali Akbar



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN  
ABSTRAKSI  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu.....	13
<b>BAB II: KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	23
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	46
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kondisi Infrastruktur.....	64
B. Kondisi Sosial Masyarakat.....	67
C. Kondisi Sumber Penghidupan.....	68
D. Kondisi Status Tanah.....	69
E. Kondisi Pendidikan.....	71
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	79

## DAFTAR BACAAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat termasuk aspek penting dalam Islam sehingga menjadi salah satu dari lima rukun Islam. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengentasan kemiskinan adalah mutlak dalam Islam. Senada dengan hal itu, zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>1</sup>

Tujuan zakat tidak sekedar hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Mapannya ekonomi suatu komunitas ummat adalah salah satu hal yang dapat menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akherat karena dapat menghantarkan pada

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hal. 71.



kesejahteraan sosial-ekonomi. Dengan demikian zakat merupakan tonggak penting untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan.

Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga-lembaga keuangan Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam yang diberdayagunakan dan dikelola oleh lembaga Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan BAZ diharapkan tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata, namun demikian bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kontrol. Nilai strategis zakat



dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari iman seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>2</sup>

Beberapa faktor yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 189-190



dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila zakat menjadi produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Jadi, zakat tidak sekedar konsumtif tetapi zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Seperti kondisi di mana tidak ada lagi mustahiq untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq) telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang



berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Mekanisme zakat dijalankan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang merupakan institusi bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan



pendayagunaan zakat.<sup>3</sup> Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni Sebagai perantara keuangan Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya<sup>4</sup>.

Pemberdayaan fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak

---

<sup>3</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hal. 27 – 28.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen....*, hal. 207 – 208.



punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah(kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity*



tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut



membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah: Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum, Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Oleh karena itu, dalam pembahasan sederhana ini akan diteliti kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan selaku masyarakat nelayan yang mayoritas belum memiliki tempat tinggal yang layak atau belum sejahtera.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan.

Agar penelitian ini dapat menjawab permasalahan pokok tersebut maka penjabarannya harus tercermin dalam



sub masalah. Rumusan sub masalah yang akan dijawab adalah:

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan?
2. Apakah dengan kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan yang demikian dapat digolongkan pada salah satu ashnaf yaitu miskin?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan demikian menggunakan metode kualitatif dengan segala persyaratannya.

#### 2. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan berproses serta analisis data bersifat induktif.<sup>5</sup> Sedangkan

---

<sup>5</sup> Robert C Bogdan and Biklen, SK, (1982). *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*, Boston, Allyn and Bacon. Inc.



perolehan data lapangan dilakukan melalui wawancara dan diskusi secara kontak langsung (*direct contact*) terhadap anggota masyarakat di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan.

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan pada langkah pertama adalah mengumpulkan data berkaitan dengan kondisi ekonomi subyek penelitian. Kemudian langkah berikutnya data ditriangulasi dengan penjelasan tokoh masyarakat, ustaz dan Kepala Lingkungan sehingga data perilaku subyek penelitian dapat dianggap sah. Tahap terakhir adalah penulisan hasil penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui instrumen pengumpulan data disusun secara teratur dan sistematis serta selanjutnya dianalisis secara kualitatif, karena kajian ini dapat juga dikategorikan dan disebut sebagai penelitian kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif, seorang peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti. Penarikan



kesimpulan didasarkan pada pemikiran logis data untuk diteliti setelah diberi penjelasan dalam bentuk uraian. Data disajikan sekaligus menganalisisnya (*deskriptif analysis*), dengan kata lain, agar tidak kehilangan relevansinya, penyajian data tidak dipisahkan dari analisisnya yang dilakukan secara bersamaan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah pokok di atas yakni bagaimana kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan, yang kemudian dirinci sesuai sub masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan
- b. Untuk mengetahui Apakah dengan kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan yang demikian dapat digolongkan pada salah satu ashnaf yaitu miskin



## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat mustahiq di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman terutama bagi para konseptor program zakat para praktisi zakat.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Survei PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) mengenai “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Berzakat” pada akhir 2007. Survey rutin yang melibatkan 2000 responden ini dilakukan setiap tiga tahun untuk mengetahui potensi dan perubahan perilaku masyarakat dalam berzakat. Survei dilakukan di 11 kota besar, yakni Medan, Padang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Populasi yang direpresentasi dalam survei ini adalah masyarakat muslim perkotaan yang dianggap memiliki kapasitas dalam berzakat. Mereka



dipilih menjadi responden survei dengan menggunakan metode multistage random sampling, sementara pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara tatap muka. Hasil Survei PIRAC menunjukkan bahwa 55% masyarakat muslim yang menjadi responden sadar atau mengakui dirinya sebagai wajib zakat (muzakki). Jumlah ini meningkat 5,2% dibandingkan survei sebelumnya (2004) yang besarnya 49,8%. Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai wajib zakat. Peningkatan kesadaran ini juga terlihat dari kepatuhan muzakki dalam menunaikan kewajibannya dalam berzakat. Survei menunjukkan sebagian besar responden yang mengaku sebagai muzakki (95,5%) menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat. Jumlah prosentase muzakki yang membayar zakat ini juga sedikit meningkat dibandingkan hasil survei 2004 yang besarnya (94,5%).

Penelitian oleh Fithriyyah Shalihati tahun 2010 dengan judul “Analisis Persepsi dan Sikap Muzzaki terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota Jakarta” di Pascasarjana Ilmu Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.



8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001, yang mempunyai dasar hukum yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 diperbarui dengan SK No. 103 tahun 2008. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan wilayah kota Jakarta yang dilakukan selama tiga bulan yaitu mulai bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Februari 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian survei, yang dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan contoh dilakukan untuk muzzaki yang membayar zakat ke Lembaga dan Non-Lembaga. Metode pengambilan sampel muzzaki yang digunakan adalah pengambilan sampel secara convenience sampling. Variabel- variabel dalam penelitian ini adalah Brand Awareness terhadap Zakat dan terhadap BAZNAS, persepsi, sikap, dan demografi Muzzaki. Pengolahan dan analisis data menggunakan tabulasi deskriptif, multiatribut Fishben dan analisis diskriminan Berdasarkan hasil analisis diatas, terlihat rata-rata tingkat keyakinan ke enam atribut mengenai BAZNAS, penilaian keyakinan Muzzaki Lembaga lebih tinggi dibandingkan



dengan Muzzaki Non-Lembaga. Namun tingkat harapan terhadap ke enam atribut baik Muzzaki Lembaga maupun Muzzaki Non-Lembaga hampir memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Dari perhitungan Ao (sikap konsumen) secara keseluruhan diperoleh skor multi atribut Fishbein Muzzaki Lembaga sebesar 97.37, -dan Muzzaki Non-Lembaga 90.41. dengan demikian secara keseluruhan Muzzaki Lembaga memang lebih menyukai Lembaga BAZNAS untuk menyalurkan zakatnya dibandingkan Muzzaki Non-Lembaga.

Penelitian oleh Gamsir Bachmid, Ubud Salim, Armanu, Djumahir Fakultas ekonomi universitas Haluoleo Kendari Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Sulawesi Tenggara tahun 2012. Judul penelitian adalah "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)". Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap dan memaknai keyakinan muzakki terhadap kewajiban zakat mal, 2) mengetahui dan memaknai perilaku muzakki dalam menunaikan zakat mal, dan 3) memaknai fenomena yang dirasakan oleh muzakki sebagai balasan atau dampak ketaatan membayar zakat. Metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis



fenomenologi Schultz. Dengan pendekatan ini maka fenomena diberi ruang seluas-luasnya untuk menceritakan dirinya sendiri, melalui pisau analisis 'because of motives' dan 'order to motives'. Berdasarkan fenomena dan pemaknaannya, maka dikemukakan proposisi mayor sebagai berikut: 1) nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh muzakki dalam membayar zakat mal adalah nilai spiritual, nilai ekonomi, nilai humanistik, dan nilai moral/psikologis; 2) memperluas kemanfaatan (mashlahah) zakat adalah tujuan utama dari perilaku muzakki, dan ditentukan oleh keberadaan lembaga pengelola yang dipercaya; dan 3) zakat yang ditunaikan secara konsisten adalah strategi alternatif untuk mengembangkan harta, memelihara kesehatan, menjaga keamanan, dan mewujudkan keturunan yang cerdas.

Penelitian berikutnya berupa thesis oleh Dadang Hylman Nadjat dengan judul "Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Mal Melalui Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Bandung" tahun 2001. Salah satu keberhasilan pengelola zakat adalah besarnya zakat yang terkumpul. Masalahnya sekarang ini perolehan zakat, khususnya zakat maal, masih rendah. Rendahnya perolehan zakat antara lain disebabkan



kesadaran muzakki ( yang mengeluarkan zakat) dalam menunaikan zakat relatif masih rendah dan ini akan tercermin didalam perilaku muzakki tersebut. Menurut Robbins (1996), perilaku individu dipengaruhi antara lain oleh persepsi, sikap, kepribadian dan motivasi. Oleh karena itu perilaku muzakki dalam berzakat akan dipengaruhi oleh persepsi, sikap, kepribadian dan motivasi. Selain hal diatas, karena zakat itu perintah agama maka perilaku muzakki juga dipengaruhi oleh kadar religiusitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi, sikap, kepribadian, motivasi dan kadar religiusitas muzakki dalam mengeluarkan zakat maal. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada muzakki yang sudah mengeluarkan zakat maal ke badan/lembaga pengelola zakat di Kota Bandung, dan hasil kuesioner diolah memakai metode analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat maal akan dipengaruhi oleh:1. Persepsi: zakat maal merupakan rukun kemasyarakatan dan bukan urusan pemerintah, penggunaan harta hams sesuai dengan ketentuan agama, zakat sama pentingnya dengan shalat, serta zakat lebih baik diserahkan ke



pengelola zakat. 2. Sikap: Bazis pemerintah belum profesional, Bazis non pemerintah sudah profesional, amilin zakat cukup profesional, ahli zakat sebagai acuan pelaksanaan zakat, serta kemudahan mendatangi tempat Bazis. 3. Kepribadian: taat menunaikan perintah agama, tidak peduli orang lain dalam berzakat dan berfikir positif dalam memahami agama. 4. Motivasi: hidup tenang, tentram dan dirahmati Allah Swt, upaya pengentasan kemiskinan, serta selamat dari hukuman dunia akhirat. 5. Kadar religiusitas: keyakinan adanya pertolongan Allah Swt dan rutin memperdalam agama Islam.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Husni Rasyid<sup>6</sup> di kota Medan yang merekomendasikan bahwa pemahaman tentang fitrah, zakat, infaq dan derma/sadakah masih memerlukan penjelasan atau informasi terutama tentang pengertian bersyukur, berbuat baik, mampu dan rezeki yang mencukupi atau berlebih. Anjuran pemerintah zakat, infaq, sedekah melalui Bazis seharusnya diimbangi dengan informasi apakah zakat sampai kepada yang menerima.

Selain itu, penelitian lain tentang zakat yang dilakukan oleh Evi Sakdiah membahas tentang peranan

<sup>6</sup> Husni Rasyid, *Kepedulian Sosial Dalam Berzakat, Berinfak dan berderma di Kotamadya Medan*, Medan, Puslit IKIP Medan, 1992





Bazis Sumatera Utara dalam mengembangkan taraf hidup pedagang kecil kota Medan studi kasus pada kecamatan Medan Perjuangan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 65% dari responden menyatakan bahwa bantuan dari Bazis Sumatera Utara kurang mempengaruhi tingkat taraf hidup mereka. Pada sisi lain penelitian ini melihat bahwa kelemahan yang terjadi dalam distribusi zakat adalah karena kurangnya tenaga ahli yang profesional dalam mengelola Bazis. Disimpulkan bahwa bantuan Bazis masih kurang dan terkesan masih bersifat cuma-cuma sehingga minat para peminjam sangat kurang untuk mengembalikan pinjaman mereka, akhirnya dianggap sedekah yang tidak perlu dikembalikan. Kemudian penelitian yang dilakukan di beberapa daerah di Jawa Barat diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta adalah: 1) untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya, jika demikian, zakat diberikan kepada fakir-miskin atau golongan lain yang sedang mengalami penderitaan. 2) untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif, misalnya rehabilitasi tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan. Di beberapa daerah zakat juga berfungsi untuk pertanian, peternakan dan koperasi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Bazis DKI Jakarta, *Pedoman Pelaksanaan Zakat, Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI*, Cetakan Kedua, Jakarta, 1978



## BAB II KAJIAN TEORI

Pada dasarnya kebutuhan dasar dalam hidup manusia menurut al-Syatibi terkandung di dalam lima unsur yang disebut *ad-daruriyat* yaitu *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (ilmu), *al-mal* (harta), dan *al'ardh* (harga diri).<sup>8</sup> Urutan kelima unsur ini sudah menunjukkan prioritas nilai guna masing-masing. Apabila kelima unsur ini diuraikan dalam bentuk fasilitas yang dibutuhkan berkaitan dengan penggunaan (pembelanjaan) harta, maka kebutuhan dasar manusia adalah : a) fasilitas dalam melaksanakan ajaran agama, seperti penutup aurat dan tempat ibadah; b) fasilitas nutrisi dan kesehatan, seperti makanan, minuman dan obat-obatan; c) fasilitas pendidikan; d) fasilitas tempat berlindung dan transportasi dan terakhir e) fasilitas menjaga harga diri dan keturunan, seperti perkawinan. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut telah terpenuhi dan masih terdapat harta yang berlebih sampai pada jumlah dan waktu tertentu maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tujuan perintah zakat untuk memperingatkan manusia terhadap kewajibannya sebagai hamba Allah, agar tidak mengikuti nafsu.

---

<sup>8</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, t, t, hal. 3-4.



Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara pemanfaatan harta adalah zakat yang terdapat-dalam Al-Qur'an kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada seorang Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW. Zakat adalah salah satu sistem diantara beberapa sistem ekonomi Islam lainnya dalam penyebaran kekayaan.<sup>9</sup> Bila merujuk pada masalah zakat ini kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ada beberapa ciri-ciri sistem perekonomian Islam yaitu : (1) Sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pendapatan.<sup>10</sup> (2) Tidak menyetujui pemborosan.<sup>11</sup> (3) Tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidakjujuran dan penipuan<sup>12</sup> dan (4) Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Pada berbagai pembahasan tentang zakat termasuk pada materi judul sistem ekonomi Islam. Dari hasil pengkajian terhadap filsafat ekonomi islam, maka lahirlah nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu :

<sup>10</sup> Q.S. 3, Ali Imran : 180 dan 9, At-Taubah : 34.

<sup>11</sup> Q.S 17, al-Isra: 26

<sup>12</sup> Q.S 11, Hud: 85 – 86

<sup>13</sup> Q.S 4, an-Nisa: 29



### A. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pembahasan kondisi ekonomi ini akan dimulai dari tinjauan bahasa, dalam kamus umum Bahasa Indonesia ada dua penafsiran kata “kondisi” yaitu persyaratan dan yang kedua adalah keadaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi ekonomi artinya adalah keadaan baik atau lancar dan tersendatnya perjalanan ekonomi<sup>14</sup>. Sedangkan ekonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “oiko” artinya aturan dan “nomos” artinya rumah tangga jadi, ekonomi adalah aturan-aturan dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Namun maksud dari ekonomi itu sendiri tentunya lebih luas dari pada aturan-aturan yang terdapat dalam suatu rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa ekonomi adalah: 1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan, 2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga, 3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara), 4) urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 586

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Bima Grafika, Jakarta, 1985, hal. 3

<sup>16</sup> Depdikbud, *op. cit.*, hal. 287



Secara terminologi, ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang bertujuan menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat dan juga bagaimana cara memperkembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semakin mudah dan distribusi semakin baik, hingga kebutuhan materi masyarakat bisa terpenuhi sebaik-baiknya baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Paul Samuelson menyatakan bahwa ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.<sup>18</sup> David C. Colander<sup>19</sup> menawarkan dua term yang dianggap dapat menjelaskan ekonomi yaitu

---

<sup>17</sup> Abdul Muhsin Sulaiman Tahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, al-Ma'arif, Bandung, 1985, hal. 29

<sup>18</sup> Paul A. Samuelson, *Economics*, edisi ke 9, Mc. Graw Hill Book, New York, 1973

<sup>19</sup> David C. Colander, *Economics*, Irwin, USA, 1995, hal. 7. Terjemahan dari definisi di atas: Ekonomi adalah: struktur kebiasaan di mana individu-individu dalam suatu masyarakat menyeimbangkan berbagai kebutuhan atau keinginan mereka, dan yang kedua: ilmu ekonomi sama dengan ekonomi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia yang berada dalam kelompok suatu masyarakat menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan



pertama, *the economy is the institutional structure through which individuals in society coordinate their diverse interests or desires* dan yang kedua, *Economics is the study of the economy, that is, economy is the study of how human beings in a society coordinate their wants and desires*.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa kegiatan ekonomi berlangsung ketika individu berada di masyarakatnya, oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak terdapat pada individu yang menyendiri. Ekonomi dapat juga dikatakan sebagai perbuatan atau perilaku yang biasanya dipandang bersifat ekonomis ialah perhatian dan perlakuan yang erat kaitannya dengan cara-cara manusia mencari nafkah hidupnya.<sup>20</sup> Bagaimana suatu keluarga, suatu suku, suatu bangsa, suatu negara memproduksi dan mendistribusikan pangan, sandang, perumahan, jasa-jasa barang-barang lain yang dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kondisi ekonomi masyarakat adalah suatu keadaan dimana perilaku setiap individu dalam lingkungan kelompoknya senantiasa berhubungan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi.

---

<sup>20</sup> George Soule, *Pemikiran para pakar ekonomi terkemuka dari Aristoteles Hingga Keynes*, Kanisius, 1994, hal. 9



Secara etimologi konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya); konsumsi dapat pula diartikan sebagai barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Singkatnya konsumsi dapat pula berarti makanan<sup>21</sup>. Konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Dalam identitas pendapatan nasional menurut - pendekatan pengeluaran, variabel biasa dilambangkan dengan huruf C sebagai inisial dari kata *consumption*. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan.

Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan dan biasa dilambangkan dengan huruf S, inisial dari kata *saving*. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan.<sup>22</sup> Penjumlahan demikian dilakukan bila ingin mengetahui kegiatan belanja dan pengeluaran suatu negara. Biasanya, pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang mapan

---

<sup>21</sup> Depdikbud, *op. cit*, hal. 591

<sup>22</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 114



cenderung pada kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier.

Aspek ekonomi yang kedua yaitu produksi yang didefinisikan dalam arti luas ialah suatu proses mentransfer masukan-masukan (inputs) dari sumber daya manusia dan akan menjadi keluaran-keluaran (outputs) yang dibutuhkan oleh para konsumen.<sup>23</sup> Produksi dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kajian positif, suatu kajian terhadap hukum benda dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi. Kedua, yaitu kajian normatif suatu kajian pada dorongan-dorongan dan tujuan-tujuan produksi.<sup>24</sup> Para ahli ekonomi berbeda pendapat mengenai penentuan faktor-faktor produksi di antaranya menyebutkan sumber-sumber daya alam, buruh, modal dan kewiraswastaan.<sup>25</sup>

Selain pendapat tersebut ada pula yang menyatakan tanah adalah faktor produksi pertama kemudian modal, tenaga kerja dan tenaga usahawan.<sup>26</sup> Menurut Dawam Rahardjo yang disebut faktor-faktor produksi hanyalah tanah yang kemudian berkembang

<sup>23</sup> Vernon A. Musselman dan John H. Jackson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, terj. Kusuma Wiriadistra, Jakarta, Erlangga, 1992, hal. 12

<sup>24</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 34

<sup>25</sup> Vernon, *op. cit*

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, *Op. cit*, hal. 4



menjadi sumber daya alam, modal uang atau moneter, sumber daya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan (tadinya termasuk dalam faktor modal), prasarana fisik yang tadinya termasuk ke dalam modal moneter, kelembagaan, wiraswasta, manajemen dan informasi.<sup>27</sup> Namun digambarkan bahwa ada beberapa faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen.

Distribusi sebagai aspek ekonomi yang ketiga dapat didefinisikan sebagai berikut: "pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi".<sup>28</sup> Secara global, distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

Bila ditelaah lebih jauh, kondisi ekonomi masyarakat secara langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan setiap individu. Dengan demikian untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan hidup yang terkait erat dengan segala sesuatu yang diperoleh suatu keluarga dan

<sup>27</sup> Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung, Mizan, 1993, hal. 355

<sup>28</sup> Sulaiman Tahir, *op. cit*, hal. 297



digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik berupa pendapatan, sumbangan, pemberian dari orang lain dan sebagainya. Pendapatan menempati posisi khusus dalam bidang ilmu ekonomi yaitu sebagai awal siklus dari ketiga unsur ekonomi. Pendapatan perorangan (*personal income*) didefinisikan sebagai jumlah imbalan untuk para karyawan<sup>29</sup>.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsumsi, perlu diketahui pola-pola pemanfaatan pendapatan yang diperoleh umumnya. Setiap negara mempunyai standard pendapatan per kapita terendah masyarakatnya sehari-hari dengan memperhatikan kebutuhan mendasar. Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*) dipromosikan oleh United Nations (1961) yang menyatakan bahwa komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi kerja, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia. Selanjutnya ILO pada tahun 1976 dengan judul "Kesempatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah Bagi Dunia"<sup>30</sup>. Kemudian menurut Green (1978) kebutuhan dasar harus memenuhi *personal consumption items* (sandang dan

<sup>29</sup> Gerardo P. Sicat dan H. W. Arndt, *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*, terj. Nirwono, LP3ES, 1991, hal. 171

<sup>30</sup> Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi*, Kanisius Yogyakarta, 1990, hal. 128



pemukiman) dan *basic public services* seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, air, pengangkutan dan kebudayaan.

Di Indonesia, Biro Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) telah menyusun komposisi kebutuhan dasar pangan dan bukan pangan yang dapat dijelaskan sebagai indikator kebutuhan minimum sebagai berikut: (a) Pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu kalori dan protein (b) sandang, dinyatakan dengan indikator-indikator keperluan pakaian, alas kaki, tutup kepala. (c) perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air. (d) pendidikan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, buku). (e) kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan termasuk obat-obatan<sup>31</sup>.

Indikator-indikator kebutuhan dasar di atas dibatasi oleh pendapatan atau upah pada standard minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1997 tentang UMR (Upah Minimum Regional) 1997. Upah minimum regional adalah standard

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 131



pendapatan minimum masyarakat Indonesia. Untuk tahun 1997 ketentuan tentang upah minimum regional tersebut pada Bab II pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Besarnya upah minimum regional didasarkan atas upah bulanan ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja. (2) Besarnya Upah Minimum regional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diadakan peninjauan kembali setiap tahun. (3) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Upah Minimum Regional<sup>32</sup>.

Adanya transfer pendapatan dalam masyarakat yaitu seseorang memberi sebahagian pendapatannya sebagai sokongan kepada saudara yang tidak mampu adalah lumrah. Dengan demikian tingkat pengeluaran ternyata tidak mencerminkan pendapatan yang diperoleh<sup>33</sup>. Selain transfer pendapatan, zakat tentunya sebagai suatu bentuk kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan, ikut serta menyokong dan memberi bantuan ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Apakah pernyataan tentang zakat tersebut benar maka penelitian ini berusaha membuktikannya dengan melakukan kontrol pada faktor-

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

<sup>33</sup> Hera Susanti dkk, *Indikator-indikator Makroekonomi*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1995, hal. 94



faktor lain (termasuk pendapatan) yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia 1993 tentang pola konsumsi masyarakat Indonesia sedikit berbeda dengan pendapat di atas. Perbandingan pola konsumsi masyarakat Indonesia dengan pola masyarakat Jepang hanya membelanjakan 17% dari pengeluarannya untuk pangan di negara-negara di Asia dapat dilihat pada melaporkan bahwa 48 persen pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia tersita untuk pangan. Bahkan bila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat perbedaan tersebut lebih kelihatan, orang-orang di Amerika Serikat yang lebih mapan membelanjakan tidak lebih dari 10% pengeluaran konsumsinya untuk kebutuhan primer tersebut.

Dibandingkan dengan negara-negara di Asia, persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga Malaysia yang hanya 23%. Akan tetapi dibandingkan India dan Cina, pola konsumsi masyarakat Indonesia layak untuk dikatakan sedikit lebih baik. Di kedua negara tersebut pangan menyita masing-masing 52% dan 61% pengeluaran konsumsi rumah tangga rakyatnya<sup>34</sup>. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rendahnya

---

<sup>34</sup> Dumairy, *op. cit.*, hal. 119 – 120



belanja kesehatan oleh masyarakat Indonesia dan Cina adalah karena biaya kesehatan di kedua negara ini memang lebih murah daripada negara-negara lain.

Pola Konsumsi Masyarakat dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis dan untuk memudahkan, secara garis besar afokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Pengeluaran rata-rata kapita orang Indonesia tercatat sebesar Rp 43.565,00 setiap bulan pada tahun 1993, menurut harga yang berlaku diantaranya, sebesar Rp 24.772,00 atau 56,86% merupakan pengeluaran konsumsi untuk makanan.

Berarti lebih separuh pengeluaran konsumsi masyarakat habis untuk makan, termasuk minum dan merokok, bagian terbesar dari pengeluaran makanan dibelanjakan untuk jenis padi-padian. Pengeluaran kelompok bukan makanan bagian terbesar dibelanjakan untuk keperluan perumahan dan bahan bakar, sedangkan pakaian, alas kaki dan tutup kepala serta sub kelompok aneka barang dan jasa menempati ukuran berikutnya.

Pola konsumsi masyarakat memang berbeda antar lapisan pengeluaran. Terdapat kecenderungan umum



bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat semakin dominan alokasi belanjanya untuk pangan. Di lain pihak, kian tinggi kelas pengeluarannya kian besar pula proporsi belanjanya untuk konsumsi bukan makanan dan jenis makanan yang dikonsumsi juga berbeda. Semakin rendah kelas pengeluaran, cenderung semakin dominan jenis padi-padian dan umbi-umbian untuk dikonsumsi.

Dalam kelompok pengeluaran untuk bukan makanan, terjadi gejala sebaliknya, semakin tinggi pengeluarannya semakin besar proporsinya secara umum, dan secara spesifik untuk berbagai jenis pengeluaran nonmakanan tertentu. Pada lapisan masyarakat yang berpengeluaran Rp. 500.000 atau lebih sebulan, proporsi pengeluaran mereka untuk perumahan dan bahan bakar adalah sepertiga dari jumlah seluruh pengeluarannya. Di kalangan masyarakat dengan lapis pengeluaran terendah (kurang dari Rp. 300.000) sebulan proporsi pengeluaran untuk itu hanya seperdelapan saja dari jumlah seluruh pengeluaran mereka.

Perilaku konsumen dalam memilih dan membeli barang atau produk juga dapat mencerminkan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Berdasarkan keinginan dan kemampuan konsumen dalam berbelanja dapat ditentukan klasifikasi suatu barang, yaitu barang yang mudah didapat



(convenience), barang yang diperbandingkan (shopping) dan barang khusus (speciality). Barang yang mudah didapat (convenience) adalah barang yang harganya murah dan mudah diperoleh barang-barang tersebut dapat dibeli dengan mudah di kedai dan warung terdekat seperti beras, gula, minyak, obat dan lain-lain. Barang yang diperbandingkan (shopping) adalah barang yang dibeli hanya setelah memperbandingkan harga, berkualitas dan modelnya, seperti pakaian, perhiasan dan perabot rumah tangga. Sedangkan barang khusus (speciality) adalah barang-barang khusus tertentu yang diinginkan seseorang.

a. Pangan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pangan sama dengan makanan, dapat pula diartikan dengan olahan makanan jadi seperti penganan, kue, saus dan sebagainya yang diolah untuk diperdagangkan<sup>35</sup>. Makan bagi manusia ialah mengambil bahan atau material dalam pemenuhan kebutuhan jasmaninya dengan mengasimilasikan dirinya dengan bahan dan dengan dirinya<sup>36</sup>. Makan juga diartikan sebagai kegiatan memasukkan makanan ke dalam tubuh.

<sup>35</sup> Depdikbud, *op. cit*, hal. 822

<sup>36</sup> Burhanuddin Salam, *Filsafat Manusia; Antropologi Metafisika*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 75



Zakiah Daradjat dalam bukunya "Peranan Agama dan Kesehatan Mental" membagi kebutuhan manusia atas dua kebutuhan pokok yaitu: a). Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmaniah seperti makan dan minum, seks dan sebagainya kebutuhan ini didapat manusia secara fitrah tanpa dipelajari); b). Kebutuhan sekunder atau kebutuhan rohaniah seperti jiwa dan sosial, kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan sudah dirasakan sejak kecil<sup>37</sup>:-

Afzalur Rahman berpendapat makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting, manusia dapat hidup tanpa pakaian, tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tetapi tidak dapat hidup tanpa makanan. Dikemukakan pula beberapa ayat Alquran mengenai status makanan dalam kehidupan manusia dan jenisnya yang berbeda-beda seperti daging segar, ikan, biji-bijian, susu, sayur-mayur, salad, buah-buahan, madu, minyak dan lain-lain seperti surah Thaha ayat 54

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾

"makanlah dan gembalakanlah binatang ternakmu",

Kemudian pada surah Abasa ayat 25-32

<sup>37</sup> Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 1970



أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝  
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝  
 وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَعًا لَكُمْ ۝  
 وَلَا نَعْمِمْكُمْ ۝

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah  
 mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi  
 dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian  
 di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran zaitun dan kurma,  
 kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-  
 rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-  
 binatang ternakmu”.

Surah Saba ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ  
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ۝

“... makanlah rezeki Tuhanmu dan berterima kasih  
 kepadanya...”

Surah al-Mukminun ayat 21:



وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
مَنْفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦٧﴾

“... kami beri minum kamu dengan (air susu) yang berada dalam perut binatang-binatang ternak itu banyak manfaatnya untukmu dan di antaranya kamu makan dagingnya” dan banyak ayat lainnya.

Begitu pentingnya kebutuhan pokok makanan dalam kehidupan manusia, sehingga di manapun berada manusia akan selalu berusaha menemukan makanannya. Di Amerika, telah diadakan berbagai penelitian untuk meneliti bagaimana perolehan makanan pada masyarakat Amerika<sup>38</sup>. Hasil-hasil penelitian tersebut kemudian diikutsertakan dalam pertimbangan pengambilan kebijakan dalam distribusi makanan.

#### b. Sandang

Kebutuhan pokok berikutnya adalah sandang yaitu bahan pakaian dan dapat pula diartikan dengan tali (dari kulit, kain, rotan, dan sebagainya) yang dipakai untuk membawa sesuatu dengan disampirkan di bahu atau

<sup>38</sup> Peter G. Brown and Henry Shue, *Food Policy: The Responsibility of The US In The Life and Death Choices*, The Free Press, New York, 1979



disilangkan di dada<sup>39</sup>. Bagi manusia, pakaian harus memenuhi beberapa aspek yaitu: 1) aspek kesehatan, 2) aspek keindahan, 3) aspek keluhuran dan 4) aspek kesusilaan. Semua aspek tersebut harus dimiliki setiap pakaian seseorang sehingga memenuhi nilai-nilai -manusiawi<sup>40</sup>.

Afzalur Rahman menjelaskan pula bahwa kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin dan agar nampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut. Al-Quran telah pula menjelaskan tentang pentingnya pakaian salah satunya surat an-Nahl ayat 81 "Allah yang menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa-apa yang telah Dia ciptakan, dan Allah menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia menciptakan bagimu pakaian yang menyenangkan ketika panas dan pakaian yang memelihara kamu dan peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu agar kamu berserah diri (kepadaNya)".

### c. Perumahan

<sup>39</sup> Depdikbud, *op. cit*, hal. 992

<sup>40</sup> Burhanuddin, *op. cit*, hal. 84



Perumahan berasal dari kata rumah yang berarti bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan perumahan itu sendiri berarti kumpulan beberapa rumah yaitu rumah tempat tinggal. Perumahan dapat pula diartikan dengan proses, cara, perbuatan menyediakan rumah<sup>41</sup>. Di Indonesia, pembangunan terarah pada tujuan terbinanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang sehat secara fisik, mental maupun keadaan sosialnya. Dengan kata lain, kesehatan merupakan kebutuhan manusia Indonesia yang utama sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar sekali. Tujuan pembangunan pemukiman adalah sebagai realisasi GBHN dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang pangan dan papan<sup>42</sup>. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut melahirkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan pencerminan dari kehendak rakyat Indonesia. Ketetapan tersebut memuat ketentuan pokok mengenai kebijaksanaan perumahan.

*The Committee on the Hygiene of Housing of the American Public Health Association*<sup>43</sup> telah menyarankan persyaratan pokok suatu rumah sehat adalah sebagai

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 967

<sup>42</sup> Eko Budi Hardjo, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 64

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 67



berikut: a) Harus memenuhi kebutuhan fisiologis yang mencakup suhu optimal dalam rumah, pencahayaan, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi yang baik, serta tersedianya ruangan untuk latihan dan bermain anak-anak. b) Harus memenuhi kebutuhan psikologis meliputi: jaminan “privacy” yang cukup, kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan keluarga secara normal, hubungan serasi antara orangtua dan anak, terpenuhinya persyaratan sopan santun pergaulan dan sebagainya. c) Dapat memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit dan pencemaran yang meliputi tersedianya penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan, adanya fasilitas pembuangan air kotor, tersedia fasilitas untuk menyimpan makanan, terhindar dari serangga dan hama. d) dapat memberikan perlindungan/ pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah meliputi konstruksi yang kuat, terhindar dari kebakaran dan sebagainya. Pentingnya tempat tinggal diisyaratkan pula oleh Al-Quran seperti surah asSyu’ara ayat 128 “apakah kamu mendirikan tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main”. Rumah adalah tempat dimana merasa nyaman, tenang, sejuk dan damai sehingga lebih mendekatkan kepada Tuhan.

#### d. Kesehatan

Banyak persepsi yang muncul bila dikatakan apa itu sehat, seperti contoh ibu-ibu dari keluarga dengan



bayi di Wales menyebutkan bahwa mempunyai kapasitas mengatasi masalah dan berfungsi sebagaimana mestinya merupakan aspek penting sehat mereka, dan mereka juga mengkaitkan kesehatan dalam arti positif berupa sikap penuh kegairahan dan antusias<sup>44</sup>. Bagi masyarakat umum sehat berarti tidak sakit. Gagasan orang tentang sehat dan merasa sehat sangat bervariasi gagasan-gagasan itu dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, nilai dan harapan-harapan, di samping juga pandangan mereka tentang apa yang akan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kebugaran yang mereka perlukan untuk menjalankan peran mereka<sup>45</sup>.

WHO, suatu organisasi dunia yang memperhatikan masalah-masalah kesehatan, mendefinisikan sehat sebagai "status kenyamanan menyeluruh dari jasmani, mental dan sosial, dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kecacatan". Walaupun terkesan begitu umum, definisi tersebut telah membuka batas-batas pengertian sehat yang biasanya hanya berhubungan dengan jasmani dan mental. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa kesehatan tidak terbatas pada

---

<sup>44</sup> Linda Ewles dan Ina Swimet, *Health Promotion*, terj. Ova Emilia, UGM Press, Yogyakarta, 1994, hal. 5 – 7

<sup>45</sup> *Ibid*



kondisi jasmani seseorang saja tetapi juga penting untuk selalu memperhatikan kesehatan sosial.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan berasal dari kata sehat yang berarti: 1) baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), 2) yang mendatangkan kebaikan pada badan, 3) sembuh dari sakit, 4) baik dan normal, 5) boleh dipercaya atau masuk akal, 6) berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya, 7) dijalankan dengan hati-hati dan baik, selanjutnya kesehatan berarti keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan.<sup>46</sup>

Masalah kesehatan tidak lepas dari masalah kebersihan sehingga pepatah menyatakan “kebersihan adalah pangkal kesehatan”. Kebersihan dan kesehatan perorangan yang baik meliputi minum air masak, buang air besar di kakus, memakai sepatu, membiasakan tidur berkelambu dan lain-lain<sup>47</sup>. Untuk penduduk kota yang tidak memiliki tanah yang cukup luas untuk membangun pembuangan kotoran biasanya menyerahkan urusan limbah atau pembuangan kotoran tersebut pada pemerintah.

Masalah kesehatan lingkungan pada penduduk kota menyangkut pada permasalahan pemukiman dan

---

<sup>46</sup> Depdikbud, *op. cit.*, hal.

<sup>47</sup> Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*, Edisi II, Alumni, Bandung, 1994, hal. 128 - 129



perumahan yaitu: 1) Penyediaan sarana dan pengawasan kualitas air bersih 2) pembuangan sampah dan air limbah 3) penyediaan sarana pembuangan kotoran 4) penyediaan fasilitas dan pelayanan umum serta pencemaran air dan udara<sup>48</sup>. Dengan pengaturan pembuangan limbah menjadikan lapangan kesehatan semakin luas. Kesehatan tidak hanya Permasalahan setelah seseorang sakit tetapi juga mencakup sebelum sakit -dengan kegiatan pencegahan.

#### e. Pendidikan

Kesimpulan Freire<sup>49</sup> tentang teori pembebasan yang menyatakan bahwa pembangunan identik dengan pembebasan belenggu pada masyarakat bawah seperti kemiskinan dan kebodohan yang hanya terjadi melalui perubahan radikal dalam struktur masyarakat dan dimulai dari penyadaran masyarakat tertindas melalui pendidikan, menguatkan pendapat ahli pendidikan lainnya betapa pendidikan adalah kebutuhan masyarakat dinamis. Salah satu program yang dapat menyiapkan dan merekayasa

<sup>48</sup> Eko Budi Hardjo, *op. cit*, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 71 - 73

<sup>49</sup> Ingemar Fagerlind and Lawrence J. Saha, *Education and National Development; A Comparative Perspective*, Pergamon Press, New York, 1983, 24 - 25



arah perkembangan masyarakat Indonesia adalah pendidikan.

Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran selanjutnya pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik<sup>50</sup>. Setiap pembicaraan mengenai pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, selalu melibatkan pembicaraan tentang tujuan-tujuan pendidikan, kandungan pendidikan dan metode pendidikan<sup>51</sup>.

Tujuan pendidikan serupa dengan tujuan hidup manusia yaitu agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam segala bidang di masa depan. Lebih jelasnya di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal empat telah dikemukakan tujuan pendidikan yaitu: "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

---

<sup>50</sup> Burhanuddin Salam, *op. cit.*, hal. 263

<sup>51</sup> Hasan Langgulung, *Teori-teori Kesehatan Mental*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1992, hal. 440.



pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan<sup>52</sup>.

Kata "taqwa" adalah satu kata yang mewakili harapan dan cita-cita setiap insan pendidikan. Secara historis filosofis, taqwa adalah identitas manusia sempurna dan ideal. Mengomentari taqwa ini, Iqbal<sup>53</sup> mengemukakan manusia bertaqwa adalah manusia sempurna yang beriman dan moralis. Berbagai penelitian telah dilakukan, analisis kebijakan sektor pendidikanpun diaktifkan, namun masih saja ada masyarakat yang tidak memperoleh akses pendidikan sama sekali.

### **1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat.**

Selain zakat tentunya banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kondisi ekonomi masyarakat adalah aspek- aspek dari kondisi ekonomi tersebut. Para ahli ekonomi telah mencoba mempelajari lebih dalam dengan kelakuan penelitian tentang konsumsi ini di antaranya, John Maynard Keynes dalam bukunya

<sup>52</sup> Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 4

<sup>53</sup> Abdul Wahid, *Thought And Reflections of Iqbal*, M. Ashraf, Lahore, 1964, hal. 51



yang berjudul *The General Theory, of Employment, Interest, and Money* mengemukakan suatu teori konsumsi yang disebut teori pendapatan absolut tentang konsumsi menyatakan konsumsi akan mengalami kenaikan apabila pendapatan naik dengan jumlah kecil<sup>54</sup>.

Namun Simon Kuznets (1949), yang melakukan penelitian dengan menggunakan data time series Amerika Serikat periode 1869-1938 mengemukakan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata ternyata tidak turun dan kecenderungan untuk menabung tidak juga naik ketika pendapatan naik. Kuznets menemukan bahwa kecenderungan konsumsi stabil atau konstan selama periode penelitian tersebut. Pendapat ini didukung oleh Raymond Goldsmith (1955)<sup>55</sup>.

Teori konsumsi yang dikembangkan Albert Ando, Franco Modigliani dan Richard Brumberg<sup>56</sup> yang dikenal dengan teori siklus kehidupan tentang konsumsi menyatakan, tingkat konsumsi rumah tangga/ seseorang tidak hanya bergantung pada current income pada periode itu, tetapi juga dan bahkan yang lebih penting ialah pada

<sup>54</sup> John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Edisi Indonesia dengan judul: Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja Bunga dan Uang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 90

<sup>55</sup> Muana Nanga, *Makroekonomi; Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Perdana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 111

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 117



pendapatan/ penghasilan yang diharapkan diterima dalam jangka panjang (*long term or whole life lime expected income*). Individu diasumsikan merencanakan suatu pada pengeluaran konsumsi semasa hidup (*lifetime*) yang didasarkan atas *expected earning* selama masa hidup mereka. Menurut teori ini faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut.

Berbeda dengan itu, Milton Friedman<sup>57</sup> di dalam bukunya *a Theory of Consumption Function* (1957), mengenalkan teori pendapatan permanen tentang konsumsi. Dinyatakan bahwa pengeluaran konsumsi sekarang bergantung pada pendapatan sekarang dan pendapatan yang diperkirakan di masa yang akan datang. Friedman mempostulatkan bahwa konsumsi adalah proporsional terhadap pendapatan. Pendapatan permanen didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata yang diharapkan diterima seseorang selama masa hidupnya, baik yang berasal dari kekayaan manusia maupun kekayaan bukan manusia dan dari pemilikan asset.

Akhirnya disimpulkan bahwa faktor yang paling utama dan terpenting (*main determinant*), seperti yang telah disebutkan di atas yaitu faktor pendapatan. Namun demikian, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera (*taste*),

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 119



faktor sosial kultural, kekayaan (*wealth*), hutang pemerintah, perolehan modal, tingkat suku bunga, tingkat harga, kredit, money illusion, penduduk, distribusi umur, lokasi geografis, distribusi pendapatan dan sebagainya<sup>58</sup>.

Kesimpulan di atas ternyata tidak menutup peluang akan adanya faktor lain yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yaitu promosi produk atau iklan<sup>59</sup>. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi tidak hanya berusaha menghasilkan produksinya dengan baik tetapi juga berusaha mengumumkan kepada masyarakat akan produksinya.

#### B. Mustahiq

Secara etimologi kata zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *zaka* artinya tumbuh (*an-nama*), suci (*at-taharah*), berkah (*al-barakah*).<sup>60</sup> Dari segi syariat, pengertian zakat adalah “memberikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan”.<sup>61</sup> Pendapat ulama yang sejalan

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> J. Paul Peter dan Jersy C. Olse, *Consumer Behavior and Marketing Strategy*, Edisi Indonesia dengan judul: *Consumer Behavior; Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 277

<sup>60</sup> Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz. 15, Dar al-Fikri, Beirut, 1956, hal. 358

<sup>61</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, al-Istiqamah, Kairo, t.t



dengan definisi tersebut di antaranya: Zakat adalah merupakan pendapatan utama negara Islam di samping pajak-pajak lain seperti pajak tanah, rampasan perang, pajak hasil bumi dan sebagainya.<sup>62</sup> Pendapat berikutnya bahwa zakat adalah bagian dan harta manusia yang dikeluarkan karena perintah Allah SWT untuk kepentingan fakir miskin dan lain-lain. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh-dua ayat Alquran disebutkan bersama dengan salat. Kewajiban zakat itu dibuktikan dengan ayat Alquran, dengan hadits Nabi SAW dan dengan ketetapan agama.<sup>63</sup>

Secara historis, zakat adalah pendapatan utama negara Islam, disamping pajak lain seperti pajak tanah, rampasan perang, hasil bumi dan lain-lain.<sup>64</sup> Menurut penjelasan Subhi as-Salih<sup>65</sup>, zakat diwajibkan pertama kali di Makkah pada permulaan Islam, tetapi ketika itu kewajiban tersebut masih umum dan belum mencakup perinciannya baik mengenai harta jenis apa yang diwajibkan dan berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Pada mulanya hal itu diserahkan pada

<sup>62</sup> Subhi as-Shalih, *An-Nuzum al-Islamiyah: Nas'athuha wa tatawwaruha*, Dar al-Ilmi lil-malayin, Beirut, 1965, hal. 354 - 355

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 1, Dar al-Kitab 'Arabi, Beirut, 1973, hal. 286

<sup>64</sup> Subhi as-Salih, *Op. cit*

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 276 - 277



perasaan dan kemurahan hati umat saja. Namun pada tahun kedua Hijrah, menurut pendapat terkuat di antara ahli, zakat wajib dalam bentuk yang lebih terperinci.

Kedatangan Islam adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia yang dipenuhi ketidakadilan. Dalam hubungan ini zakat adalah suatu kerangka teoritis untuk mendirikan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Ia bertujuan membersihkan jiwa manusia dari kekotoran, kebakhilan dan ketamakan serta untuk memenuhi kebutuhan mereka yang fakir miskin dan diselubungi penderitaan. Zakat juga digunakan untuk mengutamakan kepentingan umat, seperti memerangi inflasi dan memperkecil jurang antara berbagai lapisan sosial.<sup>66</sup>

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics : Theory and Practice*, zakat mempunyai enam prinsip yaitu: 1) Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), 2) Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, 3) Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, 4) Prinsip nalar (*reason*), 5) Prinsip kebebasan (*freedom*), 6) Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban.<sup>67</sup> Oleh karenanya bila diterapkan, ibadah zakat dengan berbagai prinsipnya memperlihatkan implikasi sosial yang positif dan dapat

<sup>66</sup> Abd al-Karim at-Tawati, *Mafhum az-Zakah wa Ab'aduha wa Hikmatu Tasri'iha fi al-Islam*, al-Manhal, 1986, hal. 24 - 41

<sup>67</sup> M. A. Mannan, *Islamic Economics : Theory and Practice*, Lahore, 1970, hal. 285



mewujudkan cita-cita setiap bangsa yaitu kemakmuran dan kesejahteraan.

Sebagai sistem redistribusi pemilikan harta atau kekayaan dalam Islam sistem zakat telah memiliki aturan dan lembaga tersendiri yang sejak zaman Nabi Muhammad saw telah dicontohkan. Sesuai dengan berkembangnya peradaban setiap zaman, tidak ketinggalan zakat dalam perkembangannya telah pula mengalami perluasan. Hal demikian dapat dibuktikan dari munculnya konsep-konsep kontemporer tentang zakat yang telah jauh melampaui pendapat-pendapat hukum zakat klasik, terutama menyangkut tiga hal pokok yaitu: 1) Perkembangan objek zakat. 2) Kemungkinan inovasi pendayagunaannya. 3) Masalah zakat dan kaitannya dengan perpajakan.<sup>68</sup>

Selain itu, profesi yang dahulunya tidak pernah ada atau belum dikenal kini telah terkena tuntutan zakat karena menghasilkan keuntungan di atas rata-rata pengeluaran modal. Bila dilihat dari sisi lain seperti perkembangan secara lembaga, pelaksanaan zakat juga telah dikembangkan dengan pembentukan lembaga yang diatur menurut undang-undang pada masing-masing badan usaha atau daerah mulai dari tingkat propinsi hingga kecamatan.

<sup>68</sup> M. al-Amin Lubis, *RUU Zakat : Upaya Mengakhiri Hukum Islam*, dalam *Republika*, 10 September 1999



Salah satu tujuan dan hikmah dari pelaksanaan zakat adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Abu al-a'la al-Maududi<sup>69</sup> bahwa zakat dalam Islam diberdayagunakan untuk "asuransi sosial" yang harus diwujudkan dan dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah dan seluruh jajarannya. Jalan yang ditempuh ada dua cara yaitu pertama menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara yang kedua memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan.<sup>70</sup> Kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong fakir dan miskin kemudian mereka yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo atau orang dewasa tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat menuntut pada terlaksananya zakat konsumtif di samping perlu melaksanakan zakat produktif bagi mereka yang kuat bekerja dan mandiri menjalankan usaha.

<sup>69</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *Usus al-Iqtisad*, terj. Abdullah Suhaili, Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam, al-Ma'arif, Bandung, 1984, hal. 113

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah II, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Kewenangan Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 23



Kondisi ekonomi masyarakat adalah suatu keadaan di mana perilaku masyarakat senantiasa berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Hubungan yang selalu tetap dengan ketiga indikator ekonomi tersebut akan menjadikan masyarakat berada dalam suatu keadaan di mana peredaran dan perputaran uang terjadi. Namun, bila masyarakat tidak mampu memproduksi dan berdistribusi dan hanya memiliki sedikit uang untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut tidak berada pada suatu kondisi ekonomi. Dalam hal ini Khursid Ahmad<sup>71</sup> dalam bukunya *Studies In Islamic Economics* melihat adanya krisis pada ilmu ekonomi dan menyebut ada sepuluh masalah global dewasa ini yang dihadapi ilmu ekonomi yaitu: 1) kemiskinan massal, 2) masa lepas landas pembangunan yang tidak kunjung tiba, 3) semakin bertambahnya disparitas pada tingkat regional, nasional dan internasional, 4) koeksistensi antara kelaparan dan kelimpahan, 5) penggunaan sumber-sumber daya alam yang tidak terbaharui secara tidak rasional, 6) ketidaksesuaian antara teknologi dan kebutuhan pembangunan, 7) ketidakcocokan antara proses produksi dan konsumsi dengan kepentingan lingkungan hidup, 8)

---

<sup>71</sup> Khursid Ahmad, *Studies In Islamic Economics*, Islamic Foundation, Leicester, 1980



eksploitasi golongan miskin dan penindasan oleh yang kaya dan yang kuat, 9) inflasi dan stagnasi yang berkelanjutan, 10) kepincangan struktural dalam hubungan antara negara berkembang dan negara miskin.

Di Indonesia, setelah menanti dalam jangka waktu yang lama akhirnya distribusi hasil-hasil zakat telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 2 disebutkan bahwa: setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Selanjutnya pada pasal tiga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki yaitu orang yang berzakat, mustahiq adalah penerima zakat dan amil zakat adalah orang yang mengumpulkan zakat.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka sejumlah institusi yang ada mulai mengelola zakat secara mandiri dengan sistem dan pengawasan tersendiri terlepas dari lembaga pengelola zakat yang didirikan dan dikelola oleh Departemen Agama dengan badan amil zakat, infaq,



sadakahnya (Bazis). Namun secara umum seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hasil zakat yang telah disalurkan.

Dalam hal ini pelaksanaan zakat erat kaitannya dengan pihak penerima zakat yaitu mustahiq. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahiq adalah: kelompok orang yang berhak menerima zakat. Imam Syafi'i berkata dlm kitab Mukhtashor " zakat fitrah dibagikan kpd orang2 yg mustahiq dlm zakat maal ( harta ), dan lebih dianjurkan kepada kerabat kandung yang tidak mendapatkan tanggungan nafkah.<sup>72</sup> yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat itu dibagi atas 8 ashnaf / golongan :

- 1.) Faqiir 2.) Miskin 3.) 'Aamil 4.) Mu.allafah 5.) Riqoob 6.) Ghorimin 7.) Sabilillah 8 .) Ibnu Sabil. Seperti yang firmankan Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

<sup>72</sup> Imam an-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab* , Darul Hadits, 6/105



(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Keterangan tentang mereka yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. *Faqīr*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, baik untuk makan, minum, pakaian atau tempat tinggal. Baik ia tidak punya harta sama sekali maupun mempunyai harta yang kurang dari setengah kebutuhan hidupnya.
2. *Miskīn*, yaitu orang yang keadaannya sedikit lebih baik dari orang *faqīr*. Ia dapat memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya.
3. Pengurus zakat (*‘āmil*), yaitu orang-orang yang mengumpulkan, menjaga dan membagi-bagikan zakat serta yang berperan serta di dalamnya seperti pengumpul, penjaga, pencatat, pengangkut dan pembaginya. Salah satu dari pengurus atau petugas zakat harus diberikan zakatnya sebagai upah kerjanya, meskipun seorang yang kaya.
4. *Mu'allaf yang dijinakkan hatinya*, yaitu seorang Muslim yang masih lemah keimanannya (seperti baru masuk Islam) padahal ia termasuk orang yang



berpengaruh di kaumnya, sehingga dengan diberikan zakat diharapkan hatinya lunak dan tetap keislaman-nya. Dan diharapkan pula dapat memberi manfaat kepadanya dan menghilangkan mudharatnya. Atau bahkan untuk menarik perhatian orang kafir lain dengan keimanannya atau sebagai motivator atau bentuk kecintaan Islam kepadanya.

5. *Untuk memerdekakan budak*, yaitu seorang budak Muslim yang ingin membeli dan membebaskan diri-nya atau seorang *mukātib* (budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya), maka dengan zakat ia dapat membayar tebusan kebebasan dirinya.
6. *Orang yang berhutang*, yaitu orang mempunyai beban hutang bukan untuk perbuatan maksiat, baik untuk dirinya atau untuk membebaskan orang lain. Ia diberikan zakat untuk meringankan beban hutangnya.
7. *Orang yang berjihad di jalan Alloh Subhanahuwata'ala*. Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang pergi berjihad di medan perang. Maka orang-orang yang dengan sukarela pergi jihad, wajib diberikan zakat, karena mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah, baik orang kaya ataupun miskin.



8. *Ibnu sabīl*, yaitu musafir yang melakukan perjalanan jauh dan sangat mengharapkan bantuan karena kehabisan bekal. Maka ia wajib diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan mengantarnya kembali ke negerinya, meskipun di negerinya termasuk orang kaya. Hal ini apabila ia tidak mendapatkan orang yang dapat dihutangi, dan bila ada orang yang dapat dihutangi, maka wajib baginya untuk berhutang.<sup>73</sup>

Catatan:

1. Zakat tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sejauh jarak perjalanan yang dibolehkan mengqashar shalat dalam jarak tersebut. Rosululloh *Sholallohu'alaihi wa Sallam* bersabda kepada Mu'adz *Radhiallohu'anhu* ketika di-utus ke Yaman:

"Dan apabila mereka tetap menaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Alloh mewajib-kan kepada mereka zakat mereka yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

2. Sah mengeluarkan zakat kepada salah satu dari delapan golongan yang berhak menerimanya.

<sup>73</sup> <http://dainusantara.com/siapa-saja-mustahiq-zakat-itu/>



Apabila jumlah zakatnya banyak, maka yang lebih utama adalah dengan memberikannya kepada semua golongan tersebut. Dan apabila jumlah zakatnya sedikit, boleh hanya diberikan kepada salah satu golongan saja dengan memperhatikan kepada yang lebih utama dan lebih membutuhkan.

3. Zakat tidak halal diberikan kepada keluarga Nabi *Sholallohu'alaihi wa Sallam* yang mulia (ahlul bait).

Termasuk di antara mereka adalah Bani Hasyim, ke-luarga 'Ali, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'far, keluarga al-'Abbas dan keluarga al-Harits *Radhiallohu'anhum*.

Rosululloh *Sholallohu'alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لَأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Sesungguhnya sedekah (*zākāt*) tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad karena ia adalah kotoran manusia." (HR. Muslim)

Sebagian ulama ada yang memperbolehkannya bila kebutuhan mereka sangat mendesak, sementara mereka dicegah dari mendapatkan haknya, yaitu seperlima dari kas baitul mal.



4. Zakat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggungan nafkahnya seperti kedua orang tua, anak dan keturunannya. Demikian pula kepada istri, namun bagi seorang istri diperbolehkan untuk memberikan zakatnya kepada sua-minya yang faqir.

Dari Abu Sa'id al-Khudri *Radhiallohu'anhu*, diceritakan bahwa Zainab *Radhiallohu'anha*, istri Abdullah bin Mas'ud *Radhiallohu'anhu* berkata:

"Wahai Nabi Allah, pada hari ini engkau memerintahkan kami untuk bersedekah (zakat) dan aku mempunyai sebuah perhiasan yang ingin kusedekahkan. Namun 'Abdullah bin Mas'ud mengaku bahwa ia dan anaknya paling berhak menerimanya. Bagaimanakah ini?", maka Rosululloh bersabda: "Ya benar, sesungguhnya suamimu Ibnu Mas'ud dan anakmulah yang lebih berhak menerima sedekahmu." (HR. al-Bukhari)

5. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, *mulhid* (atheis) dan orang fasiq seperti orang yang meninggalkan shalat dan orang yang menghina sya-ri'at Islam.

Rosululloh *Sholallohu'alaihi wa Sallam* bersabda:

"...yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka." (HR. al-Bukhari dan Muslim)



Maksudnya adalah dari orang kaya yang Muslim kepada orang miskin yang Muslim, tidak kepada yang selainnya kecuali para mu'allaf.

Demikian pula zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya -atau orang yang kuat untuk bekerja mencari penghasilan sendiri.

Rosululloh *Sholallohu'alaihi wa Sallam* bersabda:

(( وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ))

"Tidak ada bagian (zakat) bagi orang kaya dan orang yang masih kuat mencari penghidupan." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan sanad shahih)

6. Zakat adalah ibadah, maka disyaratkan untuk sahnya zakat dengan niat. Yaitu seorang *muzakkī* (wajib zakat) ketika menunaikan zakatnya. Ia berniat hanya untuk mengharap wajah Alloh *Subhanahuwata'ala* semata dan pahala-Nya. Ia harus menguatkan niatnya di dalam hatinya bahwa zakat adalah wajib.

Rosululloh *Sholallohu'alaihi wa Sallam* bersabda:



"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya."  
(HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>74</sup>

#### 4. Kondisi Infrastruktur

Pemukonangan etnis Melayu di lingkungan XI Kampung Nelayan Kabupaten Selaw - Kalimantan Tengah adalah memiliki kemandirian ekonomi yang dapat mandiri tanpa masyarakat yang lebih banyak berdomisili di Kampung Nelayan seperti di Desa Telawa yang lengkap dengan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan memiliki perikanan, serta formal di Kampung Nelayan baik dari sisi ekonomi sendiri maupun pemerintahan.

Komunitas nelayan memiliki prasarana transportasi berupa di lingkungan XI Kampung Nelayan Kabupaten Selaw - Kalimantan Tengah yang masih terbatas dapat mencapai Kabupaten Dohi Sengau (jarak selanjutnya disebut dengan Kampung Nelayan). Berjarak 20 kilometer dengan arah Kota Medan selanjutnya untuk dapat ke lokasi harus melewati dengan menggunakan kapal nelayan yang memiliki antara 5-10 orang sekitar 15 menit dengan ongkos Rp. 2000 per orang. Menyebabkan masih

<sup>74</sup> <http://dainusantara.com/siapa-saja-mustahiq-zakat-itu/>



### BAB III HASIL PENELITIAN

#### a. Kondisi Infrastruktur

Perkampungan etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan adalah memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah sikap masyarakatnya yang lebih memilih berdomisili di Kampung Nelayan daripada di Kota Belawan yang lengkap dengan berbagai fasilitas kebutuhan hidup. Pendidikan belum menjadi perhatian secara formal di Kampung Nelayan baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah.

Komunitas nelayan muslim prasejahtera bertempat tinggal di Lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan yang masih termasuk dalam wilayah kabupaten Deli Serdang (untuk selanjutnya disebut dengan Kampung Nelayan). Berjarak 26 kilometer menuju arah utara Kota Medan selanjutnya untuk sampai ke lokasi harus menyeberang dengan menggunakan boat nelayan yang memuat antara 5- 10 orang sekitar 15 menit dengan ongkos Rp. 2000 per orang. Menyeberang adalah



cara satu-satunya, tidak ada jalan darat yang menjadi alternatif.

Usaha transportasi penyeberangan biasanya dimiliki oleh nelayan yang sedang tidak melaut, jumlahnya sekitar 20 boat. Bila ingin menuju ke kawasan Kampung Nelayan Seberang cukup dengan menaiki boat penyeberangan dengan menempuh jarak sekitar 5 Km atau menempuh waktu sekitar 15 menit saja, sebagian besar warga yang tinggal di daerah terisolir di Kampung Nelayan Seberang memang sangat terbantu dengan adanya jasa kapal penyeberangan milik nelayan Belawan ini, meski hanya kapal kayu namun kapal khusus penyeberangan ini bisa mengantarkan warga dari tangkahan Sundari Belawan I hingga ke Kampung Nelayan Seberang yang dinilai perkampungan yang masih terisolir dengan tarif Rp3000/orang atau perkenderaan Rp5000.

Dermaga yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk menyeberang adalah dermaga penyeberangan nelayan yang sifatnya tidak resmi dan tidak dikelola oleh dinas perhubungan laut. Tidak berapa jauh dari dermaga ini adalah pelabuhan Belawan yang setiap harinya banyak melintas kapal-kapal besar baik dari



dalam maupun luar negeri yang merapat. Kondisi ini sering membahayakan boat-boat yang sedang menyeberang dan dialami oleh penulis ketika melakukan survey awal.

Ketika dalam perjalanan di tengah sungai, lewatlah satu kapal besar menuju pelabuhan dan saling berselisih. Akibatnya boat menjadi oleng dan hampir terbalik karena ombak yang ditimbulkan kapal besar itu. Hal demikian tentu dialami sehari-hari oleh masyarakat kampung nelayan dan bisa jadi dua atau tiga kapal besar saling berselisih pada saat yang sama boat sedang dalam perjalanan menyeberang.

Kondisi infrastruktur jalan yang terdapat di Desa Nelayan yang menurut sebahagian pendapat secara implisit bukanlah representasi dari kemiskinan melainkan bentuk-bentuk adaptasi lokal terhadap lingkungan ekologis pinggir laut, penggunaan papan sebagai landasan jalan adalah upaya mengatasi kondisi air laut yang apabila jalan tersebut berbahan semen maka akan terkikis oleh air laut dan untuk membangun jalan berbahan semen membutuhkan dana yang besar serta efektifitas yang rendah, sedangkan penggunaan papan dilihat sebagai efektifitas tinggi dalam artian tahan dari kondisi ekologis



air laut dan memiliki biaya yang terjangkau oleh penduduk Desa Nelayan.

Namun, menurut Bapak Saparudin, Kampung Nelayan baru didatangi orang-orang besar ketika mereka masih menjadi calon pejabat yaitu ketika kampanye saja dengan membawa janji-janji setelah itu, tidak pernah lagi hingga kampanye periode berikutnya. Ironisnya, pada kampanye yang lalu pernah ada satu pasangan calon walikota dan wakilnya beserta rombongan yang rata-rata berberat badan 80 kg datang dan berjalan di atas jembatan yang memang sudah lapuk rapuh dimakan panas dan hujan dan akhirnya jembatan itu seketika runtuh. Hal tersebut mengundang kekesalan warga karena mereka datang lalu merusak jembatan.

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Jumlah penduduk Kampung Nelayan yang tercatat di kelurahan Belawan I Medan adalah 525 Kepala Keluarga dengan rincian laki-laki 1.148 dan perempuan 1.117 orang. Terdiri dari mayoritas suku Melayu, Banjar dan sedikit Aceh, Padang serta suku Jawa. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Saparuddin selaku Kepala Lingkungan, dari semua penduduk yang ada di Kampung Nelayan hampir seluruhnya adalah pendatang.



Diperkirakan sejak tahun 1958 orang-orang datang dan menetap di Kampung Nelayan.

Di antara motivasi mereka datang ke tempat ini adalah agar mudah dan dekat dengan laut untuk mencari ikan dan pekerjaan sampingan yang berhubungan dengan laut lainnya.

### c. Kondisi Sumber Penghidupan

Mata pencaharian utama adalah mencari ikan, tidak sedikit yang mencari ikan dengan menggunakan sampan dayung. Selain itu nelayan juga mencari buah laut lainnya seperti kerang, kemudi kapal, kepiting, teritip dan sebagainya. Bila tidak sedang melaut mereka menyelam mencari besi-besi tua atau menjadi buruh tambak. Melaut bagi nelayan bukannya tanpa ancaman, selain harus menghadapi ombak akibat melintasnya kapal-kapal besar juga kejahatan kelompok bersenjata api di laut seperti salah satunya yang diberitakan oleh Harian Medan Bisnis pada Minggu 27 Februari 2011 bahwa nelayan pukat langgei di Belawan diserang orang bersenjata api berlaras panjang. Kondisi cuaca serta perubahan iklim turut merubah mata pencaharian nelayan pada satu waktu tertentu dan hal ini bersifat tentatif, salah satunya adalah



mencari hasil hutan yang didapat dari jejeran hutan mangrove di pinggiran pantai, adakalanya mendapatkan madu hutan atau batang mangrove yang dapat dijual sebagai komoditas ekonomi pengganti hasil laut.

Informan lapangan, Ruslan, mengatakan bahwa 'tidak selalu laut bagus, kadang jelek ... ya ke hutan', penggalan ungkapan ini memberi sinyal bahwa komoditas laut adalah primadona ekonomi namun tidak menutup celah ekonomis melalui cara lain yang masih berkaitan dengan ekologis maupun sosio-kultural masyarakat nelayan.

#### d. Kondisi Status Tanah

Tidak mudah mendapatkan bangunan permanen di Kampung Nelayan kecuali mesjid dan Sekolah Dasar. Hampir seluruh rumah penduduk berbahan kayu dan terkesan kurang teratur. Selain kemiskinan, kesulitan transportasi, masyarakat Kampung Nelayan juga harus berhadapan dengan masalah kepemilikan tanah. Status tanah yang belum jelas apakah milik kabupaten Deli Serdang atau tanah Perum Pelabuhan Belawan menjadikan mayoritas penduduk tidak memiliki hak atas tanah yang mereka tempati.



Pernah terjadi kesepakatan antara pemerintah kabupaten Deli Serdang dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat desa bahwa setiap penduduk diwajibkan membayar sewa tanah Rp. 10. 000 per bulan namun belakangan iuran tersebut terasa memberatkan. Sedangkan penduduk menginginkan dapat menjadi warga Kota Medan, selain secara geografis lebih dekat dengan Kota Medan dan lebih mudah dalam pengurusan administrasi dan pelayanan publik seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Zulfachri Siagian kepada Medan Bisnis Senin, 11 April 2011. Sebagai bukti nelayan ingin menjadi warga Medan yaitu KTP nelayan adalah KTP Kelurahan Belawan I Kota Medan hanya 40 KK yang memiliki KTP Deliserdang. Hingga kini status kependudukan warganya tak dapat ditentukan secara pasti.

Minimnya perhatian pemerintah baik pemerintah kabupaten Deli Serdang maupun Pemko Medan terhadap wilayah ini juga terlihat pada penyediaan fasilitas air bersih yang telah sejak lama menjadi masalah. Pernah ada sumur bor namun telah rusak sehingga kalau terpaksa penduduk harus menyeberang untuk mendapatkan air bersih namun jika tidak berkesempatan untuk



menyeberang ke Belawan maka harus rela menggunakan air sungai yang keruh. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan es untuk menyimpan ikan hasil tangkapan juga harus membeli ke Belawan.

#### e. Kondisi Pendidikan

Di samping itu, masalah pendidikan juga cukup memprihatinkan, hanya ada satu sekolah Dasar Negeri. Banyak anak nelayan yang terpaksa putus sekolah karena satu-satunya SD di pemukiman nelayan itu tak mampu menampung murid. Sedikitnya 100 anak nelayan putus sekolah karena sulitnya kehidupan. Mereka terpaksa ikut melaut. Baru-baru ini dibangun Madrasah Ibtidaiyah yang dipelopori oleh Majelis Ulama Islam Kota Medan namun belum sepenuhnya beroperasi. Bagi anak nelayan yang bertekad keras menyambung sekolahnya harus memenuhi konsekuensi menyeberang setiap harinya ke Belawan dan tentu menambah pula biaya transportasi dan perlengkapan uang jajan yang lebih untuk persediaan makan siang. Tidak jarang mereka harus tidak hadir sekolah karena tidak ada biaya atau ongkos naik sampan dan angkot ke Belawan



Menangkap ikan atau hasil laut lainnya merupakan proses alamiah terhadap pendidikan dasar sebagai anak nelayan yang secara langsung menerima pengetahuan tersebut didukung oleh peran lingkungan dan manusia, sehingga anak nelayan terdefiniskan sebagai anak-anak yang memiliki kemampuan sebagai seorang penangkap ikan beserta atribut lainnya sebagai masyarakat pesisir lautan. Pendidikan utama yang perlu ditegaskan adalah transmisi pengetahuan lokal mengenai adaptasi sebagai masyarakat pesisir (nelayan), pada sisi lain, pendidikan formal merupakan jenjang yang melengkapi pengetahuan lokal mereka (local wisdom). Pada sisi lain, sekolah dianggap sebagai 'institusi' yang tidak mampu menolong kondisi masyarakat sebagaimana yang umum terdengar mengenai sosial ekonomi masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan lebih percaya pada pengetahuan yang berkembang di lingkungan sebagai sumber pengetahuan yang dapat merekonstruksi kehidupan mereka.

f. Potensi Yang Belum diperhatikan

Kampung Nelayan yang berada di ujung utara Kota Medan ini sekilas seperti perkampungan rumah terapung bila air laut pasang. Tidak jauh dari spot wisata



menarik lainnya, seperti klenteng yang dihuni oleh banyak monyet, beberapa pantai dan hutan bakau. berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana wisata bahari yang terintegrasi dengan daerah Belawan daratan. Menurut Pemko Medan anggaran yang dapat diinvestasikan sekitar Rp 250 Milyar namun hingga saat ini belum ada investor yang melihat peluang ini. Kontak dagang dengan pedagang ikan yang datang baik dari Kota Medan maupun Belawan adalah rutinitas harian di Kampung Nelayan.

Bagian selatan Kampung Nelayan adalah lahan yang potensial untuk tambak udang dan ikan. Beberapa tahun yang lalu banyak pemodal dari kalangan keturunan Cina yang menanamkan modalnya untuk membuka lahan tambak. Namun belakangan tidak berkelanjutan karena hama dan tidak pernah mendapatkan keuntungan. Selain disebabkan hama binatang laut kecil yang menggerogoti tanah tambak, yang dikhawatirkan adalah hama manusia. Hingga saat ini lahan tambak dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya.

#### g. Kondisi Pelayanan Kesehatan

Bapak Syafaruddin selaku Kepala Lingkungan juga menyampaikan sejak dirinya dipercaya masyarakat





sebagai Kepling pada tahun 1986 hingga saat ini wilayahnya tidak memiliki Pustu. "Kalau dihitung-hitung ada sekitar 28 tahun-lah kami disini tidak punya puskesmas pembantu (Pustu). Memang, kata Syafruddin, kepada anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu dulunya setiap 2 hari sekali ada petugas medis datang memberikan pelayanan kesehatan ke daerahnya, namun itu tidak berjalan efektif karena tidak ada tempat. "Kalau dulu kami maklumi, tapi sekarang tempat itu telah ada seperti Posyandu. Posyandu itupun bantuan dari Pertamina dan bukan dari Pemko Medan, tapi pelayanan kesehatan itu berhenti dan tidak ada lagi sekarang," katanya. Syafruddin juga mengakui, pihaknya telah pernah mengajukan proposal permohonan pendirian Pustu melalui Puskesmas di Belawan, namun hingga saat ini belum juga terealisasi. "Kita juga tidak tahu sudah kemana proposal itu. Bahkan, beberapa kali Kadis Kesehatan berganti dan telah turun langsung melihat kondisi Kampung Nelayan Seberang, juga tidak terealisasi hingga akhir masa jabatannya," terangnya. Terus terang, tambah Syafruddin, kehadiran Pustu itu sangat dibutuhkan. Sebab, masyarakat selama ini





jika berobat harus ke Belawan menggunakan sampan penyeberangan. "Kalau itu siang hari tidak sulit. Tapi, kalau malam hari masyarakat harus memesan pemilik sampan untuk menyeberang dan itu membutuhkan cost tambahan. Makanya, kita sangat membutuhkan kehadiran Pustu itu dan dokternya bisa stand by disini," ujarnya.

#### h. Perhatian Pihak-pihak Yang Berkepentingan

Kehidupan masyarakat sehari-hari dan faktor-faktor kemiskinan yang mempengaruhinya ternyata menjadi perhatian hingga banyak pihak yang menaruh simpati untuk datang ke salah satu kantong kemiskinan di Pinggiran Kota Medan ini.

Di antara pihak-pihak yang tercatat pernah mendatangi Kampung Nelayan yaitu Ikatan Isteri Pimpinan (IIP) BUMN Sumut yang bekerjasama dengan PTPN IV, PTPN III dan PTPN II, PT Pelindo I, PT Jamsostek dan PT Pertani untuk berbagi dan peduli antar sesama, khususnya masyarakat prasejahtera di pesisir Pantai Utara Kota Medan. PTPN IV melalui Program Bina Lingkungan memberikan perbaikan dermaga dan jalan, perbaikan Balai Desa, pembuatan lapangan tempat upacara SD Negeri. PTPN II memberikan bantuan



meubelair, ruang perpustakaan, buku-buku SD. PTPN III membuat MCK 5 unit, sumur bor 10 unit. PT Pertani memberikan perlengkapan Posyandu dan PT Jamsostek memberikan perlengkapan PAUD serta tambahan sumur bor 2 unit. PT Pelindo I memberikan beasiswa bagi SD, SMP dan SMA, dengan total nilai bantuan seluruhnya Rp 820 juta. Sebelum meninjau lokasi permukiman nelayan yang dihuni sekitar 530 Kepala Keluarga (KK) di seberang lautan, rombongan IIP BUMN lebih dahulu melakukan berbagai kegiatan sosial di Restoran Marina, Jalan Serma Hanafiah, Belawan. Kegiatan ini merupakan rutinitas baksos isteri pimpinan perusahaan BUMN Sumut.

Cagubsu Chairuman dan Fadly juga tercatat yang pernah datang dan sangat disambut antusias oleh masyarakat Belawan. Dengan menaiki sampan nelayan, pasangan Cagubsu ini melakukan kampanye berkeliling perairan belawan mulai dari Titi Labuhan, TPI Belawan hingga ke Tangkahan Sundari, Kelurahan Belawan I, pada 23 Februari 2013. Perjalanan pasangan Cagubsu sepanjang lebih kurang 6 kilo dari Pekan Labuhan sampai dengan di kawasan Lorong Masjid, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, lalu dilanjutkan Fadly hingga



Ketangkahan Sundari cukup mengundang perhatian para nelayan serta masyarakat pinggiran sungai Belawan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan meminta Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk fokus melakukan pembangunan jalan setapak di Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan.

Kedatangan berbagai pihak tersebut tampaknya belum mampu secara signifikan merubah kondisi masyarakat Kampung Nelayan. Namun yang mengagumkan dari penduduk Kampung Nelayan adalah semangat dan tekad mempertahankan keyakinan agama Islam. Ketika kampanye salah satu pasangan calon walikota yang beragama non muslim ke daerah itu dan menawarkan segala hal yang akan dibangun, sedikitpun penduduk tidak tergiur dan ketika pemilihan berlangsung terbukti mereka tetap memilih pemimpin yang muslim. Selain itu, azan tetap berkumandang lima kali sehari semalam di mesjid satu-satunya di Kampung Nelayan.



Serikat Tolong- Menolong, Majlis Taklim, perwiridan  
juga masih tetap berlangsung dengan baik hingga saat ini.

#### A. Kesimpulan

Dari pengamatan yang penulis lakukan pada  
kegiatan ekstrakurikuler masyarakat Persempitan dan Melayu  
di lingkungan XL Kampung Nelayan Kelurahan Belawan  
I Kotamadya Medan dapat disimpulkan bahwa secara  
menyeluruh adalah benar masyarakat etnis Melayu di  
lingkungan XL Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I  
Kotamadya Medan termasuk dalam kriteria kelompok  
adalah satu-satunya pemukiman yang masih ada

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan  
tindak lanjut dalam berbagai usaha pengembangan  
kegiatan sumber daya manusia dalam rangka  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan XL  
Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I  
Kotamadya Medan.
2. Uraian dan Cerdikawan Melayu diharapkan dapat  
memberikan kontribusi pemikiran dan aktif dalam  
nyawa di dalam upaya pemertanian masyarakat



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pengamatan yang peneliti lakukan pada kondisi ekonomi masyarakat Perkampungan etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan dapat disimpulkan bahwa secara meyakinkan adalah benar masyarakat etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan termasuk dalam kriteria kelompok salah satu ashnaf penerima zakat yaitu miskin.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk berpartisipasi (ikut serta) dalam berbagai usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengangkat martabat masyarakat nelayan di pinggiran pantai perkampungan etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan.
2. Ulama dan Cendikiawan Muslim diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan aplikasi tindakan nyata di dalam upaya mewujudkan masyarakat



perkampungan etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan nelayan di pinggiran pantai yang religius.

3. Diharapkan kepada Pemerintah untuk berpartisipasi dan memberi motivasi serta sumbangan baik moril maupun materil agar perkampungan etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan tetap bangkit dan jaya.
4. Diharapkan kepada para Da'i, generasi muda, tokoh masyarakat untuk dapat berperan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengangkat harkat dan derajat perkampungan etnis Melayu di lingkungan XII Kampung Nelayan Kelurahan Belawan I Kotamadya Medan.
5. Diharapkan kepada mahasiswa/ i Islam untuk mempelajari dan menggali ilmu pengetahuan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air atas dari pengabdian kepada Allah SWT.

Wallahu' 'Alam.



## DAFTAR BACAAN

- Ahmad, Khursid. (1980). *Studies In Islamic Economics*. Leicester. Islamic Foundation.
- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jaziri, Abd. Rahman, (t.t). *Kitab al-Fiqhi 'alal Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: alIstiqlamah.
- Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Kutub Hmiyah.
- Al-Syatibi. (t.t). *Al-A, Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr,
- Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah DKI. (1980). *Pedoman Pengelolaan Zakat dan Infaq/ Sedekah*. Jakarta.
- Bazis DKI Jakarta. (1978). *Pedoman Pelaksanaan Zakat, Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI*. cetakan kedua.
- Colander, David C. (1995). *Economics*. USA :Irwin.
- Daradjat, Zakiah. (1970). *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Darudin, Mohammad. (1999). *Pendayagunaan Zakat di Kotamadya Bengkulu*. dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. edisi VIII. Bengkulu: Unib.
- Depag RI. (1989). *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentaftir Al-Quran.
- Depdikbud. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ewles, Linda and Ina Swimet. (1994). *Health Promotion*. terj. Ova Emilia. Yogyakarta: UGM Press



- G. Brown, Peter. and Henry Shue. (1979). *Food Policy; The Responsibility, of The US In The Life and Death Choices*. New York: The Free Press.
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Metodology Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Hanafi, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud. (t.t.). *Bada'i'us- sana'i fi tartibisy syara'i*. Mesir: al-Imam.
- Hardjo, Eko Budi. (1992). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Hasan, M. Ali. (1996). *Masail Fiqhiyuh II, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Kewenangan Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. (1996). *Masuil Fiqhiyah II, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Kewenangan Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kahf, Monzer. (1995). *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartawidjaja, M. Hidjazie dan Sumiyati M. (1980). *Kemampuan Zakat Dalam Menunjang Pembangunan Negara*. Yogyakarta: Proyek PPPT-UGM tahun 1979/1980 No. 109 Seksi Hukum Islam Fakultas Hukum UGM.
- Keynes, John Maynard. (1991). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Edisi Indonesia dengan judul: *Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja Bunga dan Uang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Langgulung, Hasan. (1992). *Teori-teori Kesehatan Mental* Jakarta: Pustaka al-Husna.



- Lubis, M. Al-Amin. (10 September 1999). RUU Zakat: Upaya Mengakhiri Hukum Islam. Dalam Republika.
- Mannan, M.A. (1970). Islamic Economics: theory and Practice. Lahore.
- Maududi, Abu al- A'la. (1984). Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam. terj. Abd. Suhaili. Bandung: Al- Ma'arif,
- al-Manzhur, Ibn. (1956). Lisan al-Arab. Juz. 15. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Sahri, (1996 ). Model dan Praktek Pemanfaatan dan Pengemhangan ZIS; Uji Coba di Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya. Malang: Unbraw.
- Musselman, Vernon A. dan John H. Jackson. (1992). Pengantar Ekonomi Perusahaan. terj. Kusma Wiriadisastra. Jakarta: Erlangga.
- Nanga, Muana. (2001). Makroekonomi; Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. Yasir. (1994). Pola Konsumsi Dalam Perspektif Islam (Analisa Filsafat Nilai dan Perilaku Ekonomi Masyarakat). Dalam Miqot. No. 80
- Pasaribu, Benny (1990). Upaya Mengentaskan Rakyat Dari Jurang Kemiskinan. Dalam Prosiding seminar dan kongres III Mahasiswa di Montreal. Kanada.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1997 tentang UMR (Upah Minimum Regional) 1997.
- Permono, Sjechul Hadi. (1994). Sumber-sumber Penggalan Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Peter, J. Paul dan Jersy C. Olse. (1999). Consumer Behavior and Marketing Strategy. Edisi Indonesia dengan judul: Consumer Behavior, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Jakarta: Erlangga.



- Qardhawi, Yusuf. (1996). Hukum Zakat. Terj. Salman Harun. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, Dawam. (1993). Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa. Bandung: Mizan.
- Rahman, Afzalur. (1995) Economic Doctrines of Islam. Jilid 2. terj. Soeroyo dan Nastangin, Dana Yogyakarta: Bakti Wakaf.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (1992). Intensifikasi, Organisasi, dan Sistematisasi Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sedekah Merupakan Salah Satu Sektor Penunjang Lajunya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Keadilan dan Kemakmuran, Suatu Tinjauan Sosio Juridis dan Ekonomis Dari Sudut Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Rasyid, Husni. (1992). Keperdulian Sosial Dalam Berzakat, Berinfaq dan Berderma di Kotamadya Medan. Medan: Puslit IKIP Medan.
- Rusyd, Ibn. (1950). Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi. cet. Ke 2
- Sabiq, Syaid. (1973). Fiqh as-Sunnah. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab 'Arabi.
- Sakka, Ambo. (1984). Fungsi Zakat Dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kodya Ujung Pandang. Ujung Pandang: Proyek Penelitian Univ. Hasanuddin.
- Salam, Burhanuddin. (1988). Filsafat Manusia; Antropologi Metafisika. Jakarta: Bina Aksara.
- Shadily, Hasan. (1977). Ensiklopedi Umum. Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin.



- Shalih, Subhi as. (1965). *An-Nuzum al-Islamiyah: Nasy'athuha wa tathawwaruha*, Beirut: Dar al-Ilmi lil-malain.
- as-Shan'ani, Ismail al-Kahlani. (t.t). *Subul as-Salam Juz II*. edisi Indonesia. Bandung: Dahlan.
- Sicat, Gerardo P. dan H. W. Arndt. (1991). *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*. terj. Nirwono. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, Masri. (1984). *Tipe, Metode dan Proses Penelitian*. Dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soedijanto. (1981). *Upaya Untuk Meningkatkan Kelompok Tani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian*, Disertasi.
- Soule, George. (1994). *Pemikiran para pakar ekonomi terkemuka dari Aristoteles Hingga Keynes*. Yogyakarta: Kanisius.
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara. (1997). *Hasil SUSENAS 1996*. Medan: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara.
- Sudijono, Anas. (1996). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (1985). *Pengantar teori Mikroekonomi*. Jakarta: Bimagrafika
- Supardi, Imam. (1994). *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*. Edisi II. Bandung: Alumni.
- Supriadi, Dedi. (1996). *Era Baru Bisnis Telekomunikasi*. STT Telkom Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susanti, Hera dkk. (1995). *Indikator-indikator Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Syaltut, Mahmud. (1965). *Al-Islamu 'aqidatun wa Syari'atun*. Mesir. Daar al-Kalam.



- Tahir, Abdul Muhsin Sulaiman. (1985). Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, terj. Anshori Umar Sitanggal. Bandung :al-Ma'arif.
- Tje'Mat, Zulkarnain. (1992). Pengelolaan ZIS PT. Pupuk Kujung. Hasil Penelitian Mandiri. Bandung
- Ulwan, Abdullah Nasih. (1985). Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999. Diperbanyak oleh BAZIS Sumatera Utara.
- Usman, Suparman. (2001). Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Waluyo, Bambang. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weissenberg, Peter. (1971). Introduction to organizational Behavior, Scranton: Intex Educational Publishers.
- Widodo, Suseno Triyanto. (1990). Indikator Ekonomi. Yogyakarta: Kanisius
- Yango, Chuzaimah T. dan Drs. Hafiz Ansary. (1997). Probelamatika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (1989). Al-Fiqh Islami Wa'adillatuhu. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr.





IA

2

130